



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 181 /Kept/403.013/2022
TENTANG

TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing setiap tahun;
 - c. bahwa guna melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Evaluator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah I, mempunyai tugas membina atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- b. Pengarah II, mempunyai tugas membantu Pengarah I dalam penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - c. Pembina mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - d. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - e. Ketua mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - f. Wakil ketua mempunyai tugas membantu Ketua atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - g. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - h. Anggota mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
 - i. Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 serta merekomendasikan perbaikan/penyempurnaan pada jajaran Perangkat Daerah dan menyajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE);

- j. Staf Administrasi mempunyai tugas membantu menyiapkan dokumen dan membantu mencatat data hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/181/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati	
2.	Pengarah II	Wakil Bupati	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggungjawab	Inspektur	
5.	Ketua	Inspektur Pembantu Investigasi	
6.	Wakil Ketua	1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Inspektur Pembantu Wilayah III 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV	
7.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat	
8.	Anggota	1. Analis Perencanaan Ahli Muda pada Inspektorat; 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat; 3. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat	Nurul Khatimah,S.Kom Supriyantini,S.Sos
9.	Tim Teknis	1. Auditor Ahli Muda; 2. Auditor Ahli Muda; 3. Auditor Ahli Muda; 4. Auditor Ahli Pertama; 5. Auditor Ahli Pertama; 6. Auditor Ahli Pertama; 7. Auditor Ahli Pertama; 8. Pengawas Pemerintah Ahli Muda; 9. Pengawas Pemerintah Ahli Muda;	Herman Susilo, S.E Jujuk W, S.IP Triana Mart S, S.E Stevanus E.K,S.H Halim P.H, S.T Andri W, S.IP Arlita Dian P,S.IP Fatma Ariana, S.T Sri Rejeki, S.E

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
		<p>10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>11. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>12. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>13. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>14. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>15. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>16. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>17. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;</p> <p>18. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>19. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>	<p>Windarti, S.E</p> <p>Fidian Fahrudin Yusuf, S.T</p> <p>Weny Subiyanto, S.Psi</p> <p>Fithry Isnaningtyas, S.T</p> <p>Tomi Praptomo, S.T</p> <p>Tri Wuryandari, S.T, M.M</p> <p>Rosediana Eka Sulistyani, S.E</p> <p>Efri Kristiana, S.Sos</p> <p>Yoga Mahardika Pratama, S.STP</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
10.	Staf Administrasi	1. Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Magetan	Yusup Setyadi, S.E Yanuar Erfan Baikhuni, S.Ak

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004